



**IDENTITAS NASIONAL SUATU BANGSA DAN NEGARA SERTA PERANAN PENTING  
KONSTITUSI DALAM KEHIDUPAN BERNEGARA**

**Banna Nidham Ulhaq, Isa Anshori**

Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sidoarjo,  
Indonesia.

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo,  
Indonesia.

[bannanidham13@gmail.com](mailto:bannanidham13@gmail.com), [isaanshori67@gmail.com](mailto:isaanshori67@gmail.com)

**ABSTRAK**

Identitas nasional adalah tanda atau ciri khas pada salah satu bangsa yang memberi perbedaan ciri-ciri bangsa satu dengan bangsa lain, karena identitas yang ada pada suatu bangsa ada pada konsep bangsa itu sendiri. Secara etimologis, identitas nasional berasal dari kata “identitas” dan “nasional”. Identitas berasal dari kata *identity* yang berarti adanya suatu karakter, sifat, atau kualitas yang berhubungan dengan individu, kelompok, atau sesuatu yang membedakannya dengan yang lainnya. Dan Nasional berasal dari kata *nation* yang berarti negara. Dan di setiap negara, diharuskan untuk menerapkan perilaku konstitusional dalam kehidupan bernegara. Karena, konstitusi secara umum adalah pokok dasaran serta norma-norma suatu bangsa, Negara, atau golongan masyarakat. Dimana yang menentukan kekuasaan, tugas pemerintah dan menjamin hak-hak tertentu bagi warganya.

**Kata kunci:** *Identitas Nasional, Bangsa dan Negara, Konstitusi,*

**ABSTRACT**

National identity is a sign or characteristic of a nation that differentiates the characteristics of one nation from another, because the identity that exists in a nation lies in the concept of the nation itself. Etymologically, national identity comes from the words "identity" and "national". Identity comes from the word identity which means the existence of a character, trait, or quality associated with an individual, group, or something that distinguishes it from the others. And National comes from the word nation which means country. And in every country, it is required to implement constitutional behavior in the life of the state. Because, in general, the constitution is the basis and norms of a nation, state, or group of people. Which determines the powers, duties of the government and guarantees certain rights for its citizens.

**Keywords:** *National Identity, Nation and State, Constitution.*

## PENDAHULUAN

Identitas Nasional adalah tanda atau ciri khas pada salah satu bangsa yang memberi perbedaan ciri-ciri bangsa satu dengan bangsa lain, karena identitas suatu bangsa terletak pada konsep bangsa itu sendiri. Secara etimologis, identitas nasional berasal dari kata “identitas” dan “nasional”. Identitas berasal dari kata *identity* yang berarti adanya suatu karakter, sifat, atau kualitas yang berhubungan dengan individu, kelompok, atau sesuatu yang membedakannya dengan yang lainnya. Dan Nasional berasal dari kata *nation* yang berarti bangsa.<sup>1</sup> Pengertian bangsa menurut antropologi sosial ialah suatu komunitas yang hidup dan mandiri yang merasakan kesatuan agama, bahasa, ras, dan adat istiadat. Bangsa dalam pengertian politik adalah masyarakat yang hidup diwilayahnya dan berada dalam kendali kedaulatannya. Oleh karena itu, nasional mengacu pada fungsi karakteristik suatu kelompok yang memiliki kesamaan karakteristik, fisik, cita-cita, dan tujuan. Dari sini dapat disimpulkan bahwa, identitas nasional ialah kelompok masyarakat yang mempunyai khas dan menghasilkan tindakan secara kolektif yang disebut dengan nasional. Berdasarkan pemahaman tersebut, setiap negara didunia pasti memiliki identitas unik yang sesuai dengan karakter dan karakteristiknya masing-masing.

Konstitusi sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh sebab itu, bangsa Indonesia telah mengesahkan UUD mulai dari UUD 1945, UUD RIS, dan UUD 1950 sampai dengan amandemen UUD 1945. Konstitusi negara tidak hanya terdiri dari teks yang terkandung dalam teks. Konstitusi diharapkan hidup dalam perwujudan kehidupan bermasyarakat dan berbangsa.

Penyelenggara wajib mentaati dan melaksanakan segala sesuatu yang diatur dalam undang-undang dasar. Demikian pula, warga negara harus mematuhi konstitusi, ketaatan konstitusional diwujudkan dalam perilaku konstitusional. Perbuatan konstitusional ialah perbuatan yang semata-mata didasarkan pada aturan-aturan administratif yang terdapat dalam UUD 1945 dan dapat juga diartikan sesuai dengan undang-undang dasar.

## TUJUAN PUSTAKA

Untuk mengetahui tentang identitas nasional suatu bangsa dan negara, serta bagaimana peranan penting konstitusi dalam kehidupan bernegara. Apakah sudah berjalan dan terealisasikan dengan mengikuti dasar negara, yaitu pancasila.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan metode studi literatur, bertujuan untuk memperinci data dengan mencari dasar-dasar teori dalam sebuah karya tulis, buku, artikel, ataupun jurnal ilmiah yang dapat dijadikan landasan didalam penelitian, dengan adanya pemahaman baru untuk memecahkan pokok permasalahan yang di teliti. Dan juga, di dalam artikel ini menggunakan metode pengumpulan data, metode pengumpulan data yang digunakan ialah kaji pustaka terhadap bahan-bahan kepustakaan yang sesuai dengan permasalahan yang diangkat dalam artikel ini. Selanjutnya, artikel ini juga disusun dengan menggunakan metode analisa. Dengan cara, mengidentifikasi permasalahan berdasarkan fakta, dan data yang ada. Menganalisis permasalahan berdasarkan pustaka dan data pendukung lainnya, serta mencari alternatif pemecahan masalah.

---

<sup>1</sup> Winarno, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi*, (Jakarta sinar: Grafika, 2013), Ed.3, Cet. 1, hlm. 9-10.

## PEMBAHASAN

### Faktor Yang Menyebabkan Setiap Negara Memiliki Identitas Nasional Yang Berbeda

Setiap negara memiliki kepribadian dan identitasnya masing-masing. Adapun salah satu cara untuk memahami identitas negara ialah dengan membandingkan suatu negara dengan negara yang lainnya, dengan melihat aspek umum dari negara tersebut. Diatas segalanya, faktor-faktor yang menyebabkan setiap negara memiliki identitas nasional yang berbeda diantara satu dengan lainnya, ialah :

#### 1. Faktor Objektif

Faktor objektif ini meliputi faktor geografis dan demografis. Kondisi geografi yang membentuk wilayah suatu Negara, dapat mempengaruhi adanya perkembangan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya pada suatu bangsa.

#### 2. Faktor Subjektif

Faktor subjektif ini meliputi faktor sosial, politik, kebudayaan dan juga sejarah yang dimiliki oleh suatu bangsa. Faktor-faktor ini sangat mempengaruhi proses terbentuknya masyarakat dan juga identitas bangsa dalam suatu Negara.<sup>2</sup>

Contohnya ialah ketika kita mendengar kata Barat, maka kita akan menggambarkannya sebagai masyarakat yang individualistis, rasional, dan memiliki kemajuan dibidang teknologi. Dan ketika kita mendengar kata Jepang, maka kita akan menggambarkannya sebagai masyarakat yang berteknologi tinggi namun masih mewarisi tradisi orientalnya. Dan apabila kita mendengar Indonesia, maka akan tergambar masyarakat yang terkesan dengan keramahannya dan kekayaan budayanya.

---

<sup>2</sup> Ahmad, *Identitas Nasional: Pengertian, Faktor, Jenis dan Unsur-unsurnya*.

### Perbedaan dan Hubungan Identitas Nasional dalam Konteks Bangsa dengan Identitas Nasional dalam Konteks Negara

Identitas nasional dalam konteks suatu bangsa biasanya mengacu pada budaya, adat istiadat, dan keunikan karakter negara tersebut. Disisi lain, identitas nasional dalam konteks negara tercermin dalam simbol-simbol nasional, contohnya: Pancasila, bendera merah putih, semboyan bangsa yaitu Bhinneka tunggal ika, UUD 1945, dan bentuk negara kesatuan republik Indonesia yang kedaulatannya ialah kerakyatan.<sup>3</sup>

Dengan mewujudkan identitas bersama sebagai suatu negara, Indonesia dapat menahan dan memperkuat eksistensinya. Sebagai bangsa dan negara yang merdeka, sebagai penguasa hubungan internasional, maka akan dihormati dan diperlakukan sama dengan bangsa dan negara lain. Identitas bersama ini juga dapat mencerminkan identitas dan kepribadian mereka. Rasa solidaritas sosial dan rasa persatuan sebagai suatu kelompok dapat mendukung upaya mencapai kemerdekaan. Dengan indentitas bersama, juga bisa menjadi motivasi dan juga menginspirasi pencapaian masa depan kejayaan bangsa dan negara.

### Munculnya Negara Tidak Dapat dilepaskan dari Keberadaan Suatu bangsa

Negara dalam pengertian sederhana dapat dipandang sebagai suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. Dalam pengertian yang lain, negara didefinisikan sebagai alat dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> I Putu Ari Astawa, *IDENTITAS NASIONAL*, hlm. 3.

<sup>4</sup> Reda Ayu Saraswati, Safari Hasan, *Konsep hubungan bangsa dan negara*.

Bangsa adalah sekumpulan manusia atau orang yang mempunyai tujuan yang sama sehingga dapat mengikat dan menjadikan suatu kesatuan, kekeluargaan, perasaan, dan adat-istiadat yang sama, dan terorganisir pada satu wilayah hukum. Oleh karena itu, jika negara dan bangsa tidak berkaitan maka kedua unsur tersebut tidak akan terlaksana. Yang dimana negara itu terbentuk karena adanya bangsa, dan suatu bangsa itu ada di dalam wilayah yang disebut dengan wilayah.

## **Perbedaan Bangsa dengan Negara**

### **1. Bangsa**

Istilah bangsa memiliki dua arti, yakni bangsa dalam konteks genealogi dan antropologi, dan bangsa dalam konteks politik. Genealogi bangsa dalam konteks antropologi adalah definisi alamiah dari suatu bangsa. Artinya, sekelompok orang yang memiliki kesamaan asal, nenek moyang, dan Bahasa yang bertempat di suatu wilayah atau daerah tertentu dan dihubungkan oleh kesamaan darah atau genetik. Bangsa adalah sekelompok orang dalam konteks politik yang memiliki rasa kepemilikan dan rasa keterkaitan berdasarkan kesamaan cita-cita, tujuan dan takdir yang mendorong mereka untuk hidup bersama di suatu wilayah tertentu untuk kelangsungan hidup dan keberadaannya.

### **2. Negara**

Negara ialah alat sosial dengan kekuasaan yang sah untuk mengarahkan hubungan manusia dalam masyarakat dan untuk mengontrol urusan kekuasaan dalam masyarakat. Definisi negara di Yunani kuno itu tertuju pada istilah *polis*, artinya lingkungan negara kota yang dimana warga negara ikut berpartisipasi dalam musyawarah pemerintah.<sup>5</sup>

## **Negara dan Konstitusi memiliki Hubungan yang Sangat erat**

Menurut Sri Soemanti, tidak ada negara di dunia saat ini yang tidak memiliki konstitusi. Negara dan konstitusi tidak dapat dipisahkan.<sup>6</sup> Contohnya, konstitusi Republik Indonesia yang dikenal dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang ditentukan pada tanggal 18 Agustus 1945 merupakan puncak perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia.

Yang dimana, Negara tidak akan dapat terbentuk dan tersusun dengan baik apabila tidak adanya konstitusi. Begitu juga sebaliknya, konstitusi tidak akan terlaksana jika tidak ada suatu Negara. Dan contohnya seperti di Negara Indonesia, yang dimana Konstitusi itu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sehingga lahirlah suatu tatanan Negara seperti yang kita rasakan saat ini.

## **Peran Konstitusi dalam Kehidupan Bernegara**

Peran konstitusi negara dalam melindungi kehidupan warga negara pasca merebaknya Covid-19 di Indonesia, salah satu contohnya . Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan manusia yang sangat penting dan merupakan bagian dari hak asasi manusia, terkhusus di Indonesia. Penunjang pemeliharaan Kesehatan merupakan bagian dari hak asasi manusia yang memerlukan sarana dan prasarana seperti fasilitas kesehatan atau pelayanan medis yang baik dan sesuai. Sebagaimana tercantum dalam pasal 28H (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI 1945): “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Kemudian dalam pasal 34 (3) UUD NRI hal

---

<sup>5</sup> Fahri Zulfikar, *Apa Perbedaan Bangsa dan Negara?*, 2021.

---

<sup>6</sup> Sri Soemantri Martosoewignyo, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, Penerbit Alumni, Bandung, 1984, hlm. 1-2.

ini diperjelas lagi sebagai berikut: “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum umum yang layak”.

Ketentuan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa negara mempunyai tugas mutlak dan sentral untuk menunjang kesejahteraan rakyat Indonesia dengan menyediakan fasilitas kesehatan yang bermutu dan memadai bagi semua orang, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 34 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”. Artinya ialah tidak ada diskriminasi dalam pemenuhan hak masyarakat Indonesia atas kesehatan. Setiap orang harus memperlakukan setiap orang secara setara ketika menerima layanan dari institusi medis tersebut.<sup>7</sup>

### **Fungsi Kontrol Antar Negara dan Warga Negara Menurut Tiga Teori Besar:**

#### **1. Pluralis**

Orang-orang pluralis melihat negara sebagai wadah atau tempat dimana kelompok masyarakat yang berbeda bersaing satu sama lain. Misi masyarakat memberikan arah kebijakan nasional. Pandangan orang-orang pluralis ini persis seperti yang diucapkan oleh Hobbes dan John Locke, bahwasannya masyarakat itu lebih awal dari negara. Negara secara normatif harus tunduk pada masyarakat, karena masyarakatlah yang menjadikan negara dan bukan sebaliknya.

#### **2. Marxis**

<sup>7</sup> Qodar Purwo Sulisty, Kaharudin Putra Samudra, *PERAN KONSTITUSI NEGARA DALAM MENGAWAL BANGKITNYA KEHIDUPAN WARGA NEGARA PASCA WABAH VIRUS COVID-19*, Print-ISSN 2355–4622 Online-ISSN 2622-9021 Vol. 7, No. 2, Oktober-Maret 2020, hh. 95-102

Teori marxis menyatakan sesungguhnya Negara ialah seperangkat institusi yang digunakan oleh borjuasi untuk menjalankan kekuasaan mereka. Dari sudut pandang ini, perbedaan dari pluralisme sangat jelas. Sedangkan teori pluralis melihat aturan kekuasaan atas warga negara, akan tetapi teori marxis melihat atas negaranya. Marxis Antonio Italia Gramsci memperkenalkan istilah “hegemoni” untuk menggambarkan bagaimana negara melakukan penindasan, tetapi tanpa menimbulkan perasaan penindasan, bahkan masyarakat bisa dikontrol dan didominasi oleh negara.

Hegemoni yang ia deskripsikan adalah ketaatan dengan ide, nilai, pemikiran, dan sebagainya. Oleh karena itu, yang dimaksud oleh Gramsci tentang hegemoni mengacu pada konsep kepatuhan terhadap *state of mind* seseorang atau warga negara.<sup>8</sup>

#### **3. Sintesis**

Sebuah sudut pandang yang memadukan kedua pandangan tersebut ialah teori strukturasi yang dicetuskan oleh Anthony Giddens. Dia memahami bahwa ada kata kunci dalam dua teori diatas. Singkatnya, struktur dan agensi selalu dialektika, dan harus dilihat sebagai dualitas, yang saling mempengaruhi dan terus maju.<sup>9</sup> Giddens menyebut teori struktural sebagai penolakan (oposisi) dualisme. Giddens mengusulkan gagasan dualitas antara aktor dan struktur. Dualitas aktor dan struktur, serta sentralitas ruang dan

<sup>8</sup> Anshori, Isa (2009) *Negara, Ideologi dan Pendidikan dalam pandangan Antonio Gramsci dan Louis Althusser*. HALAQA: Jurnal Kependidikan dan KeIslaman, 8 (1). pp. 1-100. ISSN 1412-9302 ISSN 1412-9302, Vol. 8, No.1, hal 57-66, Sidoarjo, April 2009.

<sup>9</sup> Wibowo, I, 2000, *Negara dan Masyarakat: Berkaca dari Pengalaman Republik Rakyat Cina*, Gramedia, Jakarta. hlm. 21.

waktu, merupakan dua tema sentral yang membentuk poros teori strukturasi. Dualitas berarti bahwa perilaku dan struktur saling mengandaikan.<sup>10</sup>

### **Teori Yang tepat Untuk Negara Pancasila**

Teori yang tepat untuk Negara kita ialah teori strukturasi. Karena, warga negara memiliki hak untuk mematuhi aturan negara, yang dimana telah tercermin dalam praktik sosial keseharian kita. Semua negara dan warga negara memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan bagiannya. Sementara negara mempunyai kewenangan untuk mengarahkan warganya, warga pun juga memiliki kemampuan untuk mengontrol negara. Salah satu contohnya ialah kebijakan pemerintah menaikkan minyak tanah (BBM). Pemerintah mungkin telah menaikkan harga bahan bakar dengan hati-hati untuk menghemat anggaran negara, tetapi mungkin akhirnya dihapuskan dibawah tekanan publik yang kuat.

### **KESIMPULAN**

Setiap negara memiliki kepribadian dan identitasnya masing-masing. Adapun salah satu cara untuk memahami identitas negara ialah dengan membandingkan suatu negara dengan negara yang lainnya, dengan melihat aspek umum dari negara tersebut. Dengan mewujudkan identitas bersama sebagai suatu negara, Indonesia dapat menahan dan memperkuat eksistensinya. Sebagai bangsa dan negara yang merdeka, sebagai penguasa hubungan internasional, maka akan dihormati dan diperlakukan sama dengan bangsa dan negara lain.

Bangsa adalah sekumpulan manusia atau orang yang mempunyai tujuan yang sama

---

<sup>10</sup> Isa Anshori, *Dinamika Pesantren: Pemaknaan Sosial, Ideologi dan Ekonomi di Kalangan Elite Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama*, Sidoarjo: Universitas Muhammadiyah Sidoarjo Press, 2012. Hlm. 77.

sehingga dapat mengikat dan menjadikan suatu kesatuan, kekeluargaan, perasaan, dan adat-istiadat yang sama, dan terorganisir pada satu wilayah hukum. Dan negara ialah alat sosial dengan kekuasaan yang sah untuk mengarahkan hubungan manusia dalam masyarakat dan untuk mengontrol urusan kekuasaan dalam masyarakat. Definisi negara di Yunani kuno itu tertuju pada istilah *polis*, artinya lingkungan negara kota yang dimana warga negara ikut berpartisipasi dalam musyawarah pemerintah

Menurut Sri Soemanti, pada era baru sekarang ini tiada satu Negara pun yang tidak memiliki konstitusi. Sebuah dan konstitusi ini saling berkesinambungan antara satu dengan lainnya. Contohnya, konstitusi Republik Indonesia yang dikenal dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang ditentukan pada tanggal 18 Agustus 1945 merupakan puncak perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Negara dan Warga Negara Memiliki Hubungan Yang Sangat Erat, karena Negara memiliki hak untuk ditaati peraturannya dan hal itu terlihat dalam praktek sosial di Negara kita. Negara dan warga Negara masing-masing memiliki hak dan kewajiban sesuai porsinya.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ahmad, *Identitas Nasional: Pengertian, Faktor, Jenis dan Unsur-unsurnya*.  
<https://www.gramedia.com/literasi/identitas-nasional/>
- Anshori, Isa (2009) *Negara, Ideologi dan Pendidikan dalam pandangan Antonio Gramsci dan Louis Althusser*. HALAQA: Jurnal Kependidikan dan KeIslaman, 8 (1). pp. 1-100. ISSN 1412-9302 ISSN 1412-9302, Vol. 8, No.1, hal 57-66, Sidoarjo, April 2009.  
<http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/39586>
- Fahri Zulfikar, *Apa Perbedaan Bangsa dan Negara?, 2021*.

<https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5643148/apa-perbedaan-bangsa-dan-negara-ini-penjelasan>

I Putu Ari Astawa, *IDENTITAS NASIONAL*, hlm. 3.

[https://simdos.unud.ac.id/uploads/file\\_pendidikan\\_1\\_dir/20bb958d430cc7d21ef6c2b58d14da41.pdf](https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_pendidikan_1_dir/20bb958d430cc7d21ef6c2b58d14da41.pdf)

Isa Anshori, *Dinamika Pesantren: Pemaknaan Sosial, Ideologi dan Ekonomi di Kalangan Elite Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama*, Sidoarjo: Universitas Muhammadiyah Sidoarjo Press, 2012. Hlm. 77.

<http://digilib.uinsby.ac.id/43043/2/Isa%20Anshori%20Dinamika%20Pesantren%20Muhammadiyah%20dan%20NU.pdf>

Qodar Purwo Sulistyio, Kaharudin Putra Samudra, *PERAN KONSTITUSI NEGARA DALAM MENGAWAL BANGKITNYA KEHIDUPAN WARGA NEGARA PASCA WABAH VIRUS COVID-19*, Print-ISSN 2355-4622 Online-ISSN 2622-9021 Vol. 7, No. 2, Oktober-Maret 2020, hh. 95-102

<https://juridiksiam.unram.ac.id/index.php/juridiksiam/article/view/130/62>

Reda Ayu Saraswati, Safari Hasan, *Konsep hubungan bangsa dan negara*.

[https://www.academia.edu/38079964/KONSEP\\_HUBUNGAN\\_BANGSA\\_DAN\\_NEGARA](https://www.academia.edu/38079964/KONSEP_HUBUNGAN_BANGSA_DAN_NEGARA)

Sri Soemantri Martosoewignyo, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, Penerbit Alumni, Bandung, 1984, hlm. 1-2.

Wibowo, I, 2000, *Negara dan Masyarakat: Berkaca dari Pengalaman Republik Rakyat Cina*, Gramedia, Jakarta. hlm. 21.

Winarno, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi*, (Jakarta sinar: Grafika, 2013), Ed.3, Cet. 1, hlm. 9-10.